

Siaran Pers

MENUJU VISI INDONESIA PUSAT EKONOMI SYARIAH DUNIA

Jakarta, 15 Desember 2020 – Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah (KNEKS) menyelenggarakan beberapa rangkaian acara internasional, yaitu (1) Peluncuran Islamic Finance Development Indicator (IFDI) Report oleh Refinitiv, (2) Peluncuran Laporan Perkembangan Ekonomi Syariah Daerah KNEKS, (3) Penandatanganan nota kesepahaman antara KNEKS dengan iPORTAL. Live Sdn.Bhd. secara virtual, dan (4) Webinar Internasional dengan tema "Digitilization Leading the Islamic Economy in The New Normal" pada Selasa (15/12). Acara ini diselenggarakan bersama dengan iPORTAL Live SDN. BHD. dan bekerja sama dengan Refinitiv.

Pada acara ini turut hadir Wakil Presiden RI, Ma'ruf Amin sebagai pembicara utama, CEO of Dubai Islamic Economy Development Centre (DIEDC), Abdulla Mohammed Al Awar sebagai *Honourable Special Guest Speaker*, Direktur Eksekutif KNEKS, Ventje Rahardjo sebagai pidato pembuka, serta 10 pembicara dan 2 moderator dari berbagai negara.

Indonesia dalam Laporan IFDI 2020

IFDI adalah sebuah indeks yang dikeluarkan oleh Refinitiv, The Islamic Corporation for the Development (ICD) dan The Islamic Development Bank (IsDB) untuk mengukur perkembangan industri keuangan syariah, yang juga merupakan barometer tingkat kesehatan industri keuangan syariah. IFDI mengacu pada faktor-faktor instrumental yang dikelompokkan ke dalam lima bidang pembangunan yang dianggap sebagai indikator utama, yaitu Pertumbuhan Kuantitatif, Pengetahuan (*Knowledge*), Tata Kelola (*Governance*), Kesadaran (*Awareness*), *Corporate Social Responsibility* (CSR). Dalam laporan IFDI 2020, peringkat teratas pengembangan industri keuangan syariah diduduki oleh Malaysia, Indonesia, Bahrain, UAE dan Saudi Arabia.

Rangking Indonesia berdasarkan IFDI terus mengalami peningkatan tiap tahunnya, yaitu peringkat 10 di tahun 2018, peringkat 4 di tahun 2019, dan peringkat 2 di tahun 2020. Seperti pada tahun 2019, peningkatan peringkat Indonesia di tahun 2020 sangat dipengaruhi oleh indikator Pengetahuan (*Islamic Finance Knowledge*), yang didalamnya termasuk peningkatan pendidikan dan riset keuangan syariah.

Indikator Kesadaran (*Islamic Finance Awareness*) juga menjadi faktor penting peningkatan peringkat Indonesia, mengingat banyaknya acara terkait keuangan syariah setahun kebelakang. Kedua indikator tersebut adalah hasil nyata implementasi Masterplan Ekonomi Syariah (MEKSI) 2019-2024 yang merupakan kerangka kerja pembangunan, strategi dan rencana aksi pengembangan ekonomi syariah Indonesia.

Hal tersebut disampaikan oleh Mustafa Adil selaku Head of Islamic Finance Refinitiv dalam konferensi pers yang digelar setelah acara berlangsung. Mustofa mengungkapkan Indonesia adalah salah satu negara dengan pertumbuhan tercepat, dengan aset keuangan syariah naik dari 86 miliar USD di 2018 menjadi 99 miliar USD di 2019. Rencana merger 3 bank HIMBARA menjadi Bank Syariah Indonesia diprediksi dapat lebih mempercepat pertumbuhan keuangan syariah Indonesia.

Pemerintah Indonesia terus meningkatkan komitmennya di sektor takaful, yaitu dengan mengeluarkan amandemen aturan pembebasan kepemilikan saham asing di unit usaha takaful dari 80% menjadi lebih. Pemerintah Indonesia dan BUMN juga telah mengeluarkan kebijakan untuk

menawarkan pilihan takaful sebagai asuransi para pegawai. Hal ini sesuai dengan yang dituliskan dalam Masterplan Ekonomi Syariah (MEKSI) 2019-2024.

Selanjutnya Mustafa Adil menambahkan, Indonesia menjadi negara pertama yang menerbitkan Green Sukuk Ritel di tahun 2019. Green Sukuk tersebut digunakan sebagai sumber pembiayaan inovatif untuk proyek infrastruktur dalam negeri. Selain Green Sukuk Ritel, Indonesia juga menjadi negara pertama yang menerbitkan Sukuk Blockchain di sektor dana sosial keagamaan. Sukuk berbasis blockchain ini dikeluarkan pertama kali oleh BMT Bina Ummah di tahun 2019.

Terkait manajemen aset syariah, di tahun 2019 telah diluncurkan aplikasi model agregator bisnis untuk reksa dana syariah. Aplikasi ini bertujuan agar para manajer investasi dapat memperluas sasaran pemasaran kepada kaum milenial yang erat dengan teknologi digital.

Direktur Eksekutif KNEKS Ventje Rahardjo mengungkapkan prestasi ini tentunya tak lepas dari peran seluruh pemangku kepentingan yang terus berkolaborasi, bersolidaritas dan berkomitmen tinggi dalam mendorong perkembangan industri keuangan syariah Indonesia.

Direktur Infrastruktur Ekosistem Syariah Sutan Emir Hidayat memaparkan dalam mendukung perkembangan industri keuangan syariah Indonesia, KNEKS telah merancang strategi dengan fokus pengembangan sampai dengan tahun 2024 di lima aspek, yaitu jasa keuangan syariah, keuangan sosial syariah, bisnis dan kewirausahaan syariah, industri produk halal, dan infrastruktur ekosistem syariah. Hal ini tentunya disesuaikan dengan panduan MEKSI 2019-2024 dalam rangka mewujudkan visi Indonesia sebagai pusat ekonomi syariah dunia.

Laporan Perkembangan Ekonomi Syariah Daerah

Laporan Perkembangan Ekonomi Syariah Daerah disusun untuk mengetahui perkembangan sektor-sektor ekonomi dan keuangan syariah di tingkat Provinsi/Daerah khususnya terkait aspek regulasi/peraturan, data fundamental, praktik bisnis/studi kasus, tantangan, peluang investasi, dsb., di sektor industri halal serta UMKM halal, keuangan syariah, keuangan mikro syariah, keuangan sosial syariah (ZISWAF), pengembangan ekonomi pesantren dan pendidikan ekonomi/keuangan syariah.

Direktur Infrastruktur Ekosistem Syariah Sutan Emir Hidayat mengungkapkan laporan ini dapat menjadi suatu referensi atau *benchmark* kinerja Pemerintah Provinsi/Daerah dalam hal pengembangan ekonomi dan keuangan syariah sehingga dapat diambil sebagai langkah strategis oleh masing-masing Pemerintah Daerah/Provinsi terkait pengembangan ekonomi dan keuangan syariah di daerah/provinsi tersebut.

Selain itu, laporan ini adalah sebagai sebuah pendekatan *top-down* dan *bottom-up* untuk mendorong Pemerintah Daerah/Provinsi dalam hal penguatan ekosistem ekonomi Syariah serta pengembangan potensi lokal ekonomi dan keuangan Syariah di daerah/provinsi masing-masing, serta sebagai suatu metode pembelajaran silang (*cross-learning*) terkait keunggulan masing-masing provinsi/daerah pada program-program, praktik bisnis/kasus studi, kebijakan, inovasi yang terkait dengan sektor-sektor ekonomi dan keuangan syariah.

Adapun metodologi yang digunakan beberapa instrumen pengumpulan data antara lain melalui Focus Group Discussion (FGD), dan kuesioner terstruktur yang berupa kuesioner data fundamental institusi/lembaga serta kuesioner interview kepada pimpinan institusi/lembaga di provinsi tersebut. “Kedua-belas (12) Provinsi yang diobservasi dalam kajian ini yaitu Provinsi Aceh, Provinsi Sumatera Utara, Provinsi Sumatera Barat, Provinsi DKI Jakarta, Provinsi Jawa Barat, Provinsi Jawa Tengah, Provinsi Yogyakarta, Provinsi Jawa Timur, Provinsi Kalimantan Selatan, Provinsi Kalimantan Timur,

Provinsi Sulawesi Selatan, Provinsi Nusa Tenggara Barat,” ujar Emir, panggilan akrab Direktur KNEKS yang sebelumnya menjabat sebagai Wakil Dekan di University Collage of Bahrain ini.

MoU KNEKS & iPORTAL. Live Sdn.Bhd. dan Webinar Internasional

Penyelenggaraan Webinar Internasional dilakukan sebagai bentuk kolaborasi KNEKS dengan iPORTAL Live SDN. BHD. dan Refinitiv. Pembicara pada webinar ini berasal dari para stakeholder Keuangan Syariah global di 7 negara, yaitu KNEKS-Indonesia, iPORTAL Luxembourg, DIEDC-Dubai UAE, UNDP Indonesia, CTO IBM USA, UN-ESCWA (Lebanon), dan Singularity Ventures (Malaysia).

Diangkatnya tema "Digitilization Leading the Islamic Economy in The New Normal" berangkat dari besarnya minat dan permintaan ekonomi syariah khususnya pada aspek digital yang dapat memberikan dampak sosial yang luas dan berkelanjutan baik nasional dan global. Dalam pidatonya, Wakil Presiden RI Ma'ruf Amin mengungkapkan tujuan terselenggaranya webinar untuk menggali, mendorong dan mengoptimalkan digitalisasi ekonomi syariah dalam menghadapi era baru paska pandemi 'New Normal'.

"Dalam agenda hari ini, tentunya adalah kesempatan kita bersama untuk melihat tantangan ekonomi syariah pada aspek digital di era new normal ini, masa dimana masyarakat menjadikan sarana digital sebagai sebuah kebutuhan," ujar Ketua Harian KNEKS ini. Sejak diresmikannya Masterplan Ekonomi Syariah Indonesia (MEKSI) pada tahun 2019, Indonesia terus berkomitmen untuk melakukan pemanfaatan dan penguatan ekonomi digital sebagai strategi utama dalam pengembangan ekonomi syariah, yang tentunya memerlukan kerjasama dan kolaborasi bersama banyak pihak.

Sejalan dengan hal tersebut, Direktur Eksekutif Ventje Rahardjo dalam kata sambutannya mengungkapkan bahwa dalam medorong perkembangan ekonomi syariah di dunia, diperlukan sinergi kuat seluruh pemangku kepentingan terkait. "Termasuk kerja sama antara KNEKS dan iPORTAL dalam agenda ini adalah untuk mendukung pembangunan ekonomi dan keuangan syariah, khususnya di bidang digital. KNEKS sebagai katalisator pembangunan ekonomi dan keuangan syariah terus berupaya memperkuat dan memperluas kerjasama nasional dan internasional untuk pengembangan ekonomi syariah dan keuangan syariah dalam mencapai visi Indonesia sebagai pusat ekonomi syariah dunia," ungkap Ventje.

Informasi lebih lanjut dapat menghubungi :

Inza Putra – Kepala Divisi Promosi dan Hubungan Strategis
Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah (KNEKS)
Gedung Permata Kuningan Lantai PH
Jl. Kuningan Mulia kav. 9C, Jakarta 12830
Telepon: (021) 80683349 | Email: inza.putra@kneks.go.id | www.kneks.go.id

Tentang Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah (KNEKS)

Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah (KNEKS) merupakan perubahan dari Komite Nasional Keuangan Syariah (KNKS). KNEKS didirikan tanggal 10 Februari 2020 berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 28 Tahun 2020. KNEKS dipimpin oleh Presiden sebagai Ketua dan Wakil Presiden sebagai Ketua Harian, dan Menteri Keuangan menjadi Sekretaris merangkap anggota.

KNEKS didirikan untuk melakukan tugas mempercepat, memperluas dan memajukan pengembangan ekonomi dan keuangan syariah dalam rangka mendukung ketahanan ekonomi nasional. Dalam melaksanakan tugas, KNEKS menjalankan fungsi Pemberian rekomendasi arah kebijakan dan program strategis pembangunan nasional di sektor ekonomi dan keuangan syariah; Pelaksanaan koordinasi, sinkronisasi, sinergisitas penyusunan dan pelaksanaan rencana arahan kebijakan dan program strategis pada sektor ekonomi dan keuangan syariah; Perumusan dan pemberian rekomendasi atas penyelesaian masalah di sektor ekonomi dan keuangan syariah; Pemantauan dan evaluasi atas pelaksanaan arah kebijakan dan program strategis di sektor ekonomi dan keuangan syariah.

Dalam mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi tersebut, maka anggota KNEKS terdiri 3 Menteri Koordinator, 7 Menteri, 3 Ketua lembaga pemerintah dan 2 Instansi lainnya, yaitu: Menko Perekonomian, Menko Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, Kemaritiman dan Investasi, Menteri Keuangan, Menteri Agama, Menteri Perindustrian, Menteri Perdagangan, Menteri PPN/Kepala Bappenas, Menteri BUMN, Menteri Koperasi dan UKM, Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/Kepala Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Ketua Dewan Komisioner OJK, Gubernur Bank Indonesia, Ketua Dewan Komisioner LPS, Ketua Umum MUI dan Ketua Umum KADIN.